

ABSTRAK

Suatu tindakan kejahatan tidak dibenarkan dalam undang-undang salah satunya tindak pidana dibidang pelayaran. Seorang yang melakukan suatu tindak kejahatan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun pertanggungjawaban dalam perkara Nomor: 474/Pid.B/2021/PN Byw. Didapati dalam perkara ini terdakwa yang melakukan kesalahan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hakim tidak melihat kesalahan yang dilakukan terdakwa melanggar ketentuan undang-Undang Pelayaran dan KUHP. Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan untuk menjelaskan atau mengartikan bagaimana proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pertimbangan yudisial dan tanggung jawab syahbandar? Masalah ini menjadi pusat diskusi melalui penggunaan metodologi seperti legislatif, konseptual, dan analisis studi kasus. Metode yuridis normatif diterapkan pada penelitian ini, yang melibatkan pemeriksaan data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pertanggungjawaban dalam kasus Nomor: 474/Pid.B/2021/PN Byw. Tidak sesuai pada ketentuan UndangUndang Pelayaran dan KUHP yang berlaku. Kesalahan yang di perbuat oleh terdakwa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Selain itu, putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kurang tepat karena tidak melihat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim menyatakan terdakwa terbukti tidak bersalah dan dinyatakan bebas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Pelayaran, Putusan Hakim

ABSTRACT

A crime is not permitted by law, one of which is a crime in the shipping sector. A person who commits a crime should be criminally responsible. However, accountability in case Number: 474/Pid.B/2021/PN Byw. It was found that in this case the defendant who made a mistake could not be held accountable because the judge did not see that the defendant's mistake was in violation of the provisions of the Shipping Law and the Criminal Code. The research carried out has the aim of explaining or interpreting how the decision-making process is influenced by judicial considerations and the responsibilities of the harbormaster? This issue becomes the center of discussion through the use of methodologies such as legislative, conceptual, and case study analysis. The normative juridical method was applied to this research, which involved examining secondary data which was then analyzed qualitatively. The research results show that accountability in case Number: 474/Pid.B/2021/PN Byw. Not in accordance with the provisions of the Shipping Law and the applicable Criminal Code. The errors committed by the defendant should be criminally responsible because they have fulfilled the elements of the article charged. Apart from that, the decision handed down by the panel of judges to the defendant was inappropriate because it did not see the error committed by the defendant so the judge declared the defendant proven innocent and was declared free.

Keywords: Accountability, Shipping Crimes, Judge's Decision